KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 156/HUK/TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 227/HUK/TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE/SISTEM INFORMASI BERBASIS INTERNET PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA PONTIANAK

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggota tim dikarenakan purna tugas, perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 227/Huk/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website/Sistem Informasi Berbasis Internet Pada Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 227/Huk/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website/Sistem Informasi Berbasis Internet Pada Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Pontianak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Nomor 227/Huk/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Pengelola Website/Sistem Informasi Berbasis Internet Pada Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pontianak ini.

KEDUA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

PEMERINTAH KOTA PONTIANA SEKRETARIAT DAERAH

AMRULLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 156/HUK/TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 227/HUK/TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE/SISTEM INFORMASI BERBASIS INTERNET PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOTA PONTIANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA / JABATAN
1.	PENANGGUNG JAWAB	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK
2.	KETUA	KEPALA BAGIAN HUKUM
3.	KOORDINATOR MERANGKAP ANGGOTA	ANALIS HUKUM AHLI MUDA
4.	ANGGOTA	1. ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA 2. PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN 3. DOKUMENTALIS HUKUM

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

AMIRULLAH